

**PERANAN SEKTOR PERIKANAN DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH
DAN STRATEGI PENGEMBANGANYA DALAM RANGKA OTONOMI
DAERAH KABUPATEN BALANGAN**

**THE ROLE OF FISHERIES SECTOR IN REGIONAL DEVELOPMENT
AND THE STRATEGY OF ITS DEVELOPMENT IN THE FRAMEWORK**

¹⁾*Syahrida Ariani*, ²⁾*Idiannor Mahyudin*, ³⁾*Emmy Sri Mahreda*

¹⁾Program Studi Magister Ilmu Perikanan Program Pascasarjana Unlam

^{2,3)}Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan. Fakultas Perikanan

Email : S2perikanan_unlam@yahoo.co.id

ABSTRAK

Kabupaten Balangan mempunyai sumber daya perairan yang cukup besar dan berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah, diharapkan peran pemerintah Kabupaten Balangan yang mempunyai wewenang sebagai pelaksana eksplorasi dan pengelolaan kekayaan perairan harus bisa menggali potensi dari sektor perikanan agar lebih optimal dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menerapkan teknik perencanaan pembangunan wilayah Kabupaten Balangan. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan sektor perikanan terhadap perekonomian Kabupaten Balangan dan menetapkan alternatif strategi pengembangan sektor perikanan dalam rangka otonomi daerah di Kabupaten Balangan

Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah studi kasus dan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis keuntungan dan analisis SWOT (Isu Strategis & Identifikasi Masalah)

Berdasarkan hasil analisis SWOT dan perhitungan pembobotan dengan matriks QSP didapatkan alternatif strategi urutan prioritas untuk pengembangan sektor perikanan sebagai berikut : 1) Pemerintah daerah komitmen terhadap pengembangan sektor perikanan melalui alokasi anggaran, 2) Pemerintah daerah melalui Dinas PTPHPP meningkatkan peran BBI dan UPR untuk menghasilkan induk dan benih yang berkualitas dan memiliki sertifikasi, 3) Meningkatkan peran dan fungsi penyuluh perikanan, 4) Meningkatkan pemanfaatan potensi lahan budidaya dengan komoditas unggulan yang bernilai ekonomis tinggi, 5) Pemerintah daerah melalui dinas Pertanian TPHPP melakukan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam penguasaan teknologi, 6) Memfasilitasi masyarakat untuk mengakses permodalan ke perbankan, 7) Perlu adanya regulasi kebijakan dan langkah nyata untuk mengatasi meningkatnya harga pakan, 8) Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi memfasilitasi peta jalur pemasaran bagi petani ikan sehingga harga ikan bisa tetap stabil, 9) Perlu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat terutama untuk diversifikasi poduk menjadi produk olahan, 10) Perbaiki fasilitas infrastruktur dan fungsi sarana dan prasarana produksi budidaya perikanan melalui perbaikan saluran irigasi dan BBI, 11)

Pemerintah daerah lebih mensosialisasikan skim perkreditan untuk rakyat KUR melalui sosialisasi kepada masyarakat.

Kata Kunci : Potensi Perikanan, Alternatif Strategi Pengembangan Sektor Perikanan

ABSTRACT

Balangan Regency has a fairly large waters resources and potentially increase revenues original areas, expected role of Government that has the authority Balangan Regency as Executive exploration and wealth management waters should be able to dig into the potential of the fishery to be more optimal in order to exercise the autonomy of the region. In General, this research aims to apply the techniques of planning regional development Balangan Regency. Whereas in particular this research aims to know the role of the fisheries sector to the economy and setting the Balangan Regency alternative strategies for the development of fisheries sector in the framework of regional autonomy in Balangan Regency.

Research methods used are descriptive qualitative, and used case studies approaches and analysis of the data used descriptive analysis, analysis of profit and SWOT analysis (Strategic Issues and problem identification).

Based on the results of the SWOT analysis and the calculation of weighting matrix with QSP obtained the alternative order of precedence for the development strategy of the fishery as follows: 1) local government commitment to the development of the fisheries sector through the allocation of the budget, 2) of local government through the Office of PTPHPP improves the role of BBI and UPR to produce quality seeds and stem and have a certification, 3) increases the role and function of fisheries extension, officers, 4) increase the utilization potential of land fish breeding with commodities consider superior high valued economically, 5) local government through the Department of agriculture TPHPP do coaching and mentoring to the public so as to enhance the community's knowledge and skills in mastering technology, 6) to facilitate the community to access capital to banking, 7) need for regulatory policy and real step to cope with the high price of feed aquaculture through the improvement of irrigation channels and BBI, 8) local governments through the Exchange Service for industry, trade and cooperatives facilitates map marketing line for fish farmers so that the price of fish could remain stable, 9) need to do coaching and mentoring to the community especially to the processed products to be verified products, 10) Improved infrastructure facilities and function facilities and infrastructure production, 11) of local Government more for socialize skim credit for the people KUR through the socialization to the community.

Keywords: Potential Fisheries, Fishery Development Strategy Alternatives

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai subsistem pemerintahan Negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat (Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999).

Konsekuensi logis dari otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, maka dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan daerah dituntut untuk dapat menggali potensi yang ada di daerahnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan untuk peningkatan pendapatan daerah, maka kiranya perlu dianalisis potensi ekonomi (kontribusi) dari semua sektor, termasuk di dalamnya adalah sektor perikanan. Diharapkan pada akhirnya dapat menyusun perencanaan pembangunan di daerah secara efektif dan efisien sebagai modal pembangunan dalam mewujudkan otonomi daerah.

Kabupaten Balangan mempunyai sumber daya perairan yang cukup besar

dan berpotensi sebagai sumber pendapatan bagi keuangan daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, diharapkan peran pemerintah Kabupaten Balangan yang mempunyai wewenang sebagai pelaksana eksplorasi dan pengelolaan kekayaan perairan harus bisa menggali potensi dari sektor perikanan agar lebih optimal dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan pokok yang akan dikembangkan adalah bagaimana peranan sektor perikanan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan alternatif strategi pengembangan sektor perikanan dalam rangka otonomi daerah kabupaten Balangan.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menerapkan teknik perencanaan pembangunan wilayah Kabupaten Balangan. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan sektor perikanan terhadap perekonomian Kabupaten Balangan dan menetapkan alternatif strategi pengembangan sektor perikanan dalam rangka otonomi daerah di Kabupaten Balangan.

METODE PENELITIAN

Alat dan Bahan

Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah studi kasus yaitu bagaimana peranan sektor perikanan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan alternatif strategi pengembangan sektor perikanan dalam rangka otonomi daerah kabupaten Balangan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Balangan. Penelitian berlangsung dari bulan Januari 2013 sampai dengan Januari 2014, mulai dari konsultasi proposal penelitian, pelaksanaan penelitian, pengumpulan data dan analisis data sampai dengan pembuatan laporan

Analisis Data

Pengambilan Sampel dilakukan secara purposive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut antara lain adalah pertimbangan keterwakilan masalah. Selain itu dilakukan juga pengambilan sample secara Stratified Random Sample, yaitu

sampel yang dipilih adalah sample yang terlebih dahulu dipisahkan elemen-elemen populasi dalam kelompok-kelompok sehingga tidak terjadi overlapping (strata), kemudian dipilih sebuah sampel secara random dari tiap stratum. Metode ini digunakan untuk melakukan analisis keuntungan usaha perikanan di Kabupaten Balangan.

Jenis dan Sumber Data menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis keuntungan dan analisis SWOT (Isu Strategis & Identifikasi Masalah).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian peranan sektor perikanan dalam pembangunan wilayah Babupaten Balangan meliputi apa saja potensi sektor perikanan di Kabupaten Balangan, Analisis keuntungan usaha perikanan di Kabupaten Balangan dan alternatif strategi pengembangan sektor perikanan dalam rangka otonomi daerah Kabupaten Balangan.

Potensi Perikanan

Perikanan di Kabupaten Balangan terdiri dari perikanan tangkap dan budidaya. Perikanan tangkap dilakukan di sungai dan rawa, sedangkan budidaya dilakukan di kolam dan keramba.

Kegiatan penangkapan ikan di Kabupaten Balangan hanya dilakukan sebagai usaha sampingan dan belum dikelola dengan baik. Kegiatan ini masih bisa dikembangkan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan termasuk kelestarian perairan agar kontribusinya dalam peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat dapat ditingkatkan. Pengembangan teknologi penangkapan ikan ditekankan pada teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan (*environmental friendly fishing technology*) dengan harapan dapat memanfaatkan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan.

Kabupaten Balangan mempunyai luas 1.878,3 km² atau jika dikonversi dalam hektar menjadi 18.783 ha. Berdasarkan data yang diperoleh potensi sumberdaya perikanan di Kabupaten Balangan cukup besar, yaitu 11.740,5 ha atau 62,51% dari luas wilayah kabupaten Balangan adalah perairan umum yang

terdiri dari rawa 20,87% dan 41,64% sungai yang semuanya adalah aset Balangan untuk diberdayakan guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan peningkatan PAD.

Adapun kegiatan budidaya yang dilakukan di Kabupaten Balangan terus berkembang. Lokasi budidaya tersebar di semua Kecamatan dengan tingkat produksi terbesar di Kecamatan Lampihong, Paringin Kota dan Batumandi. Komoditas yang dominan dipelihara adalah jenis ikan mas, nila, patin, betok dan lele. Bibit ikan diperoleh dari hasil pembenihan dan hasil tangkapan dari alam.

Dari data yang diperoleh produksi budidaya perikanan mulai tahun 2009 hingga tahun 2011 bisa dikatakan stabil sesuai target yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan. Produksi budidaya perikanan tertinggi pada tahun 2011 yaitu mencapai angka 205 ton, ini dicapai melalui budidaya perikanan yang dilakukan di kolam, keramba dan jaring apung.

Analisis Keuntungan Usaha Perikanan

Usaha perikanan di Kabupaten Balangan sebagian besar merupakan

sumber pendapatan sampingan bagi petani ikan di daerah ini, hanya sebagian kecil yang melakukan usaha perikanan sebagai mata pencaharian utama.

Besarnya keuntungan yang diperoleh petani ikan di Kabupaten Balangan dapat diketahui dengan menggunakan alat analisis $\pi = TR-TC$. Responden yang diambil dari kegiatan budidaya dan penangkapan ikan. Jumlah responden dari kegiatan budidaya 10 orang yang terdiri dari usaha pembenihan ikan 2 orang dan pembesaran 8 orang. Hasil perhitungan dan pembahasan yang telah dilakukan usaha pembudidaya baik melalui pembesaran maupun pembenihan menguntungkan.

Rata-rata keuntungan kegiatan pembenihan maupun pembesaran sangat bervariasi. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan hal tersebut terjadi karena beberapa hal, antara lain manajemen budidaya yang kurang baik seperti kuantitas dan kualitas pemberian pakan, penetapan jadwal pembesaran mulai tebar benih sampai dengan waktu panen.

Kegiatan budidaya baik melalui pembenihan maupun pembesaran masih bisa dikembangkan sehingga produksi

dapat terus meningkat. Hal ini dapat diwujudkan dengan dukungan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan melakukan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam penguasaan teknologi budidaya perikanan.

Pembuktian Hipotesis

Hipotesis usaha budidaya perikanan di Kabupaten Balangan menguntungkan dengan menggunakan analisis keuntungan. Analisis keuntungan yang dilakukan pada responden pembudidaya ikan yang terpilih diperoleh total penerimaan lebih besar daripada total pengeluaran sehingga hipotesis tentang diduga usaha budidaya perikanan menguntungkan terbukti.

Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman dalam Pembangunan dan Pengembangan Sektor Perikanan di Kabupaten Balangan

- a. Faktor-faktor Kekuatan
 - 1. Potensi lahan mendukung kegiatan budidaya perikanan
 - 2. Tersedianya sarana Balai Benih Ikan Lokal (BBIL) dan Unit Perikanan Rakyat (UPR)
 - 3. Dari tahun ke tahun minat masyarakat untuk melakukan usaha di sektor perikanan terus meningkat, terlihat dari jumlah pembudidaya yang selalu bertambah.
- b. Kelemahan Sektor Perikanan Kabupaten Balangan
 - 1. Walaupun dari tahun ke tahun minat masyarakat melakukan usaha perikanan terus meningkat tapi dibandingkan minat masyarakat untuk melakukan usaha di bidang pertanian dan perkebunan masih jauh lebih sedikit.
- 2. Rendahnya pengetahuan tentang teknologi budidaya perikanan
- 3. Harga pakan meningkat
- 4. Lemahnya daya saing
- c. Peluang Sektor Perikanan Kabupaten Balangan
 - 1. Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)
 - 2. Tingkat konsumsi ikan meningkat
- d. Ancaman Sektor Perikanan Kabupaten Balangan
 - 1. Aspek infrastruktur yang masih belum memadai terutama dalam hal sarana dan prasarana produksi perikanan.
 - 2. Jaringan pemasaran yang lemah
 - 3. Harga ikan yang rendah ketika produksi meningkat
 - 4. Kurangnya investasi di sektor perikanan.
 - 5. Kurang berperannya kelembagaan penyuluhan, terlihat masih kurangnya pembinaan terhadap pembudidaya ikan.
 - 6. Penurunan kualitas air

Tabel 18. Hasil identifikasi faktor internal dan eksternal

No	Faktor Internal	Faktor Eksternal
1	Kekuatan :	Peluang :
	1. Potensi lahan sangat mendukung kegiatan budidaya perikanan	1. Adanya Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)

<ol style="list-style-type: none"> 2. Tersedianya sarana Balai Benih Ikan Lokal (BBIL) dan Unit Perikanan Rakyat (UPR) 3. Dari tahun ke tahun minat masyarakat untuk melakukan usaha di sector perikanan terus meningkat, terlihat dari jumlah pembudidaya yang selalu bertambah 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Tingkat konsumsi ikan makin tinggi
<p>2 Kelemahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya pengetahuan tentang teknologi budidaya perikanan 2. Harga pakan meningkat 3. Lemahnya daya saing 4. Minat masyarakat melakukan usaha perikanan lebih rendah dibandingkan minat masyarakat untuk melakukan usaha di bidang pertanian dan perkebunan 	<p>Ancaman :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan kualitas air 2. Kurang berperannya kelembagaan penyuluhan, terlihat masih kurangnya pembinaan terhadap petani ikan 3. Jaringan pemasaran yang lemah 4. Aspek infrastruktur yang masih belum memadai terutama dalam hal sarana dan prasarana produksi perikanan 5. Harga ikan yang rendah ketika produksi meningkat 6. Jaringan pemasaran yang lemah 7. Kurangnya investasi di sektor perikanan

Sumber : Data primer yang diolah

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kabupaten Balangan memiliki potensi perikanan yang besar untuk dikembangkan. Potensi perikanan tersebut meliputi potensi perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan hasil perikanan. Potensi ini dapat dikembangkan dengan dukungan semua pihak yaitu masyarakat itu

sendiri dan Pemerintah Kabupaten Balangan.

2. Keberhasilan pembangunan perikanan yang berkelanjutan tergantung pada kemauan dan komitmen segenap *stakeholders* yang bersifat partisipatif. Pengelolaan bersama antara pihak pemerintah, swasta, masyarakat lokal, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sepatutnya diterapkan untuk sektor perikanan
3. Pada dasarnya usaha budidaya perikanan yang dilakukan

menguntungkan dengan keuntungan yang sangat bervariasi, dari responden yang diambil bisa dilihat rata-rata keuntungan per bulan. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan hal tersebut terjadi karena beberapa hal, antara lain kurangnya pengetahuan tentang manajemen budidaya yang baik, maka perlu diadakan berbagai pelatihan-pelatihan dalam rangka pembinaan yang tujuan utamanya adalah untuk mengoptimalkan produksi yang dihasilkan oleh sektor perikanan

4. Berdasarkan hasil analisis SWOT dari perhitungan IFAS dan EFAS menghasilkan skor internal lebih besar dari ada skor eksternal, skor internal yang lebih besar dari pada skor eksternal menunjukkan bahwa dari kondisi internal organisasi disarankan untuk menggunakan strategi bertahan, mengendalikan kinerja internal agar tidak terperosok. Strategi ini dipertahankan sambil terus berupaya membenahi diri dan masih perlu banyak dukungan serta pembinaan sehingga dari sektor perikanan bisa memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan

wilayah dan strategi pengembangannya dalam rangka otonomi daerah.

Saran

1. Pembangunan sektor perikanan harus mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah kabupaten Balangan dengan memberikan dana alokasi APBD yang cukup untuk sektor perikanan.
2. Dengan segala potensi yang ada, hendaknya peningkatan produksi perikanan lebih diarahkan pada perikanan budidaya dengan melibatkan masyarakat yang lebih luas yang bertujuan memperluas kesempatan kerja dan berkontribusi secara signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Balangan.
3. Sebagai sumberdaya yang dapat pulih peran sektor perikanan harus terus ditingkatkan dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah, dengan lebih banyak memberikan stimulant dan bantuan langsung.
4. Perlu penelitian lebih lanjut dengan metode penelitian yang lain dengan

data yang lebih lengkap untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari kondisi setor perikanan dan perekonomian daerah Kabupaten Balangan dan menyelaraskannya

dengan sektor lain sehingga tercipta link and match system ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Brannen, J. 2005. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Hikmah, Purnomo AH. 2012. *Kesiapan Dan Strategi Kebijakan Pengembangan Minapolitan*. Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Kurniawan, Tony F. 2010. *Analisis dan Reformasi Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Di Indonesia*
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2010. *Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2010 – 2014*. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Laporan Statistik Perikanan 2010. *Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Kalimantan Selatan*.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Monintja, D. 2001. *Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir Dalam Bidang Perikanan Tangkap*. Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir, Institut Pertanian Bogor.
- Muflikhati I, Farmayanti N, Yulianto G. 1996. *Peranan Subsektor Perikanan Dalam Perekonomian wilayah Jawa Barat*. Fakultas Perikanan IPB. Bogor
- Nasir, Mohammad. 2003. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Nontji, A. 1997. *Laut Nusantara*. Djambatan. Jakarta.
- Pearce dan Robinson. 1998. *Analisis Swot*. ([http://www.daps.bps.go.id / file_artikel / 66 / Analisis Swot.pdf](http://www.daps.bps.go.id/file_artikel/66/Analisis%20Swot.pdf), diakses tanggal 05 Nopember 2013)

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten

Rangkuti, Freddy. 2001. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk Menghadapi Abad 21*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Rizal A. 2013. Kinerja Sektor Perikanan Provinsi Banten. Laboratorium manajemen Bisnis Perikanan. Fakultas Perikanan dan Kelautan. Universitas Padjadjaran.

Rustam Acong. 2012. Dampak Positif Keberadaan PPI Terhadap Pendapatan Nelayan dan Masyarakat di Kecamatan Pulau Laut Utara (Studi Kasus : PPI Kotabaru Desa Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan [tesis]). Banjarbaru. Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Perikanan.

Sarawani. 2012. Kajian Potensi dan Pengembangan BBI di Kecamatan Pulau Laut Utara (studi kasus : BBI Kotabaru Desa Gedambaan Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan. Banjarbaru.

Todaro, M.P. 2000. *Pembangunan Ekonomi I*. Edisi Kelima. PT. Bumi Aksara

Tukiyat. 2002. *Pengantar Pengembangan Ekonomi Wilayah. Di Dalam : Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah*, editor : Prihantoro, Ambardi. Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah BPPT. Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan.

Vredenburg, J. 1987. Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat. Gramedia. Jakarta.

_____. 2013. *Penyusunan Agrowisata di Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan*. Tim Peneliti Unlam bekerjasama dengan Bappeda HSS.